

**PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT DAN REPUTASI
KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) TERHADAP KETEPATAN WAKTU
PELAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN *MULTIFINANCE* YANG
TERCATAT DI BEI**

NYAYU FADILAH FABIANY*)

*) Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambi

ABSTRACT

This study entitled "The Effect of Audit Committee Characteristics and Reputation Public Accounting Firm (KAP) of the Financial Reporting Time linessin the Multifinance Company Listedon the Stock Exchange". This studyis a survey researchby processing as econdary virginannual report published on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The populationin this studyis afinance companythat is listed on the Stock Exchange 2011-2013. Samples taken during theperiod 2011-2013 amounted to 13 companies are selected based onthe intentand purpose of the study (purposive sampling).

To determine the effect of Membership of the Audit Committee, member of Audit Committee Independence, Proportion Independent Commissioner, Competence, and Reputation Public Accounting Firm (KAP) the time linessof financial reporting by using logistic regression.

The conclusion of this study that the Audit Committee, and Reputation Public Accounting Firm (KAP) with the same no significant effect onthe time liness offinancial reporting. Variable Membership of the Audit Committee, member of Audit Committee Independence, Proportion Independent Commissioner and Public Accounting Firm Reputationdoes not significantly influence the time liness offinancial reporting. While the competence variables significantly influence the time liness offinancial reporting.

Key words: audit committee characteristics and time liness of reporting financial

PENDAHULUAN

Di Indonesia bidang akuntansi baru dikenal tahun 1950an sejalan dengan mulai tumbuhnya perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sejalan dengan perkembangan ekonomi dan bisnis maka perekonomian mendorong berdirinyaorganisasi profesi akuntansi yang dikenal dengan sebutan "Ikatan AkuntansiIndonesia" (IAI) pada tanggal 23 Desember 1957.

Semakin berkembangnya perusahaan di Indonesia, permintaan jasa audit meningkat. Faktor-faktor yang menjadi pendorong tingginya permintaan jasa audit dan pesatnya pertumbuhan profesi akuntan publik di Indonesia adalah karena perkembangan pasar modal, pertumbuhan ukuran dan kompleksitas bisnis, serta regulasi (perundang-undangan, peraturan-peraturan).

Kantor Akuntan Publik merupakan tempat penyediaan jasa oleh profesi akuntan publik bagi masyarakat berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP).Jasa yang diberikan Kantor Akuntan Publik berupa jasa audit operasional, audit kepatuhan, dan audit laporan keuangan.

Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya. Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa akuntan publik akan menjadi lebih tinggi, jika profesi tersebut menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan profesional yang dilakukan oleh anggota profesinya. Profesi akuntan publik bertanggungjawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan. Auditor eksternal dalam menjalankan profesinya diatur oleh kode etik profesi.

Di Indonesia dikenal dengan nama Kode Etik Akuntan Indonesia. Disamping itu dengan adanya kode etik, masyarakat akan dapat menilai sejauh mana seorang auditor eksternal telah bekerja sesuai dengan standar-standar etika yang telah ditetapkan oleh profesinya.

Dengan melihat kenyataan yang ada tentang arti penting seorang auditor sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan suatu perusahaan/instansi itu bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan, maka sudah sepantasnya hal tersebut di atas diberi perhatian lebih karena adanya suatu harapan yang tinggi terhadap kinerja profesional seorang auditor dalam melaksanakan penugasan auditnya.

Auditor eksternal dalam melaksanakan audit, memperoleh kepercayaan dari klien dan para pemakai laporan keuangan untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh klien. Klien dapat mempunyai kepentingan yang berbeda, bahkan mungkin bertentangan dengan kepentingan para pemakai laporan keuangan. Demikian pula, kepentingan pemakai laporan keuangan yang satu mungkin berbeda dengan pemakai lainnya.

Profesi Auditor eksternal (akuntan publik) saat ini sedang mendapatkan sorotan tajam bahkan sinis dari masyarakat umum akibat terjadinya skandal-skandal besar di Negara maju seperti AS dan di Indonesia.

Yang pertama Kasus Enron dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur Andersen sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar. Mungkin saja pelanggaran tersebut awalnya mendatangkan keuntungan bagi Enron, tetapi akhirnya dapat menjatuhkan kredibilitas bahkan menghancurkan Enron dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur Andersen.

Dalam kasus ini, Kantor Akuntan Publik (KAP) yang seharusnya bisa bersikap independen tidak dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur Andersen. Karena perbuatan mereka inilah, keduanya menuai kehancuran dimana Enron bangkrut dengan meninggalkan hutang milyaran dolar sedangkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur Andersen sendiri kehilangan keindependensiannya dan kepercayaan dari masyarakat terhadap kinerja Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut, juga berdampak pada karyawan yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur Andersen dimana mereka menjadi sulit untuk mendapatkan pekerjaan akibat kasus ini.

Keberadaan komite Audit merupakan persyaratan bagi perusahaan yang *listed* di *New York Stock Exchange (NYSE)* sejak akhir tahun 1970 dan menjadi ketentuan hukum di Kanada sejak pertengahan tahun 1970. Di beberapa negara, ketentuan mengenai keberadaan komite ini berangsur-angsur diterima sebagai suatu kewajiban

bagiperusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Sejalan dengan kecenderungan internasional ini, persyaratan semacam ini telah ditetapkan oleh Bepepam di Indonesia melalui *Good Corporate Governance* yang diterbitkan pada bulan Maret 2001.

Keberadaan Komite Audit dan Komisaris Independen pada perusahaan publik di Indonesia ditandai dengan keluarnya Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia (BEI) No. Kep-315/BEJ/06/2000 perihal: Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A, tentang ketentuan umum pencatatan efek bersifat ekuitas di Bursa. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib memiliki Komite Audit dan Komisaris Independen. Peraturan ini secara efektif diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 2000.

Berdasarkan peraturan tersebut, Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris perusahaan publik yang mencatatkan diri di BEI yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Tugas Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris melakukan pemeriksaan yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam kepengelolaan perusahaan. Komite Audit bertugas memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi. Terbentuknya Komite Audit pada perusahaan-perusahaan di banyak negara merupakan ciri dari *Corporate Governance* yang mulai terbentuk dengan baik.

Pedoman *Good Corporate Governance* dipersiapkan dan disusun oleh *Task Force* Komite Audit yang dibentuk oleh Komite Nasional Kebijakan *Good Corporate Governance* dengan tujuan agar dunia bisnis memiliki acuan dasar yang memadai mengenai konsep serta pola pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang sesuai dengan pola internasional umumnya dan Indonesia pada khususnya.

Pedoman ini juga memberikan bimbingan kepada perusahaan Indonesia dalam pembentukan komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris perusahaan. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit secara garis besar mencakup penelaahan (*review*) atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya, melaporkan kepada komisaris berbagai resiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen resiko oleh direksi, serta penerapan praktek-praktek tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Oleh karena itu keberadaan Komite Audit terkait dengan *Good Corporate Governance* dan dapat dijadikan tolak ukur bagi suatu perusahaan, apakah sudah melaksanakan *Good Corporate Governance* dengan baik atau belum.

Komite Audit adalah salah satu pilar penting dalam penerapan *Good Corporate Governance*, karena dalam menelaah laporan keuangan mereka juga diikutsertakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Komite Audit memiliki peranan penting dalam mengawasi berbagai aspek organisasi. Komite Audit dibentuk untuk membantu *Board of Directors*, minimal dalam hal integritas laporan keuangan perusahaan, ketaatan perusahaan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, independensi dan kualitas auditor independen, dan kinerja fungsi audit internal perusahaan dan kinerja auditor independen, yang secara spesifik dinyatakan dalam *New York Stock Exchange (NYSE) Corporate Accountability and Listing Standart Commite* tanggal 6 Juni 2002.

Berdasarkan saran penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Proporsi Komisaris Independen,

Kompetensi atau *Financial Expert*, Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut sehingga dapat diketahui bahwa Proporsi Komisaris Independen, struktur anggota komite telah menjalankan fungsinya sebagai salah satu mekanisme *corporate governance* secara benar. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Karakteristik Komite Audit dan Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan *Multifinance* yang Tercatat di BEI”**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan permasalahan ini antara lain :

1. Apakah Karakteristik Komite Audit, dan Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan *multifinance* yang *listed* di BEI periode 2011-2013?
2. Apakah Karakteristik Komite Audit, dan Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan *multifinance* yang *listed* di BEI periode 2011-2013?

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Dalam penelitian ini unsur-unsur dari karakteristik Komite Audit terdiri dari keanggotaan Komite Audit, independensi Komite Audit, proporsi Komisaris Independen, Ketua komite Audit, dan kompetensi serta Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. Masing-masing unsur dijelaskan sebagai berikut:

a. Keanggotaan Komite Audit

Peraturan BEI menyatakan bahwa kedudukan Komite Audit berada dibawah Dewan Komisaris dan salah seorang Komisaris Independen sekaligus menjadi ketua Komite Audit. Komite Audit terdiri sekurang-kurangnya satu orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar emiten.

Tujuan diadakannya Komite Audit dan Komisaris Independen adalah dalam rangka pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Salah satu parameter terlaksananya *good corporate governance* yaitu meningkatkan ketepatan pelaporan keuangan perusahaan. Ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan dapat dilihat dari ada atau tidaknya sanksi dari Bapepam sebagai pembina dan pengawas Pasar Modal. Pada tahun 2003, tercatat sudah 227 emiten atau 84% (dari total emiten=331) yang terdaftar di BEI telah memiliki komite audit, diantaranya 7 emiten BUMN. Sehingga masih ada 44 emiten yang belum memiliki komite audit. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran akan pentingnya penerapan *corporate governance* masih kurang padahal rekomendasi tentang perlunya komite audit dalam struktur perusahaan sudah ada sejak tahun 1999.

b. Independensi Komite Audit

Peraturan pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit menyebutkan bahwa anggota Komite Audit sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota yang berasal dari luar *Emiten* atau Perusahaan Publik. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga independensi dari Komite Audit itu sendiri. Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (2001) juga mensyaratkan bahwa Komite Audit beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris, ini berarti

bahwa syarat minimal adalah dua anggota Komite Audit yang berfungsi sebagai ketua dan anggota Komite Audit. Pada Desember 1999, *New York Stock Exchange (NYSE)* dan *NASDAQ* memperbaharui persyaratan Komite Audit bagi perusahaan yang terdaftar di bursa saham.

Dalam standar yang baru, perusahaan harus memiliki Komite Audit sedikitnya 3 anggota, dimana semua anggota tidak boleh memiliki hubungan dengan perusahaan karena akan mengganggu independensi mereka dari manajemen dan perusahaan. Peraturan baru ini sebagai respon atas permintaan *Stock Exchange Committee (SEC)* untuk meningkatkan efektivitas Komite Audit dalam rangka pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Salah satu parameter terlaksananya *good corporate governance* yaitu meningkatnya integritas pelaporan keuangan perusahaan. Integritas pelaporan keuangan perusahaan dapat dilihat dari ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan.

c. Proporsi Komisaris Independen

FCGI (2000) menyatakan bahwa keberadaan komisaris independen telah diatur dalam Bursa Efek Indonesia melalui peraturan BEI tanggal 1 Juli 2000. Dikemukakan bahwa perusahaan yang *listed* di bursa harus mempunyai komisaris independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham minoritas (bukan *controlling shareholders*). Dalam peraturan ini, jumlah persyaratan minimal adalah 30 % dari seluruh Dewan Komisaris. Tujuan diangkatnya Komisaris Independen adalah untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Salah satu hak pemegang saham adalah memperoleh laporan keuangan yang berkualitas sedangkan integritas pelaporan keuangan perusahaan dapat dilihat dari ketepatan waktu pelaporan.

d. Kompetensi

BRC (1999) merekomendasikan setiap Komite Audit mempunyai sekurang-kurangnya satu anggota yang mana mempunyai keahlian keuangan, yang didefinisikan sebagai pengalaman kerja dalam hal keuangan atau akuntansi. Rekomendasi BRC ini didukung oleh berbagai penelitian empiris yang membuktikan bahwa Komite Audit yang memiliki *Certified Public Accountant (CPA)*, pernah menjadi anggota Komite Audit, atau memiliki pengetahuan yang bagus tentang auditing, berpengaruh secara positif terhadap adap lingkungan yang akan mereka hadapi yaitu auditor dalam rangka membantu mengatasi masalah hubungan auditor dengan *corporate managers*. Dalam Surat Edaran Bapepam No.SE.03/IPM/2002 yang mengatur persyaratan independensi keanggotaan Komite Audit salah satu butir menyebutkan bahwa salah seorang dari Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.

Ini sejalan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi dimana perusahaan wajib menyediakan informasi yang terbuka, tepat waktu serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan. Pelaksanaan prinsip transparansi ini dapat dilihat dari ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan.

e. Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Suatu laporan keuangan atau informasi akan kinerja perusahaan harus dapat disajikan dengan akurat dan terpercaya. Oleh karena itu, perusahaan kemudian

menggunakan jasa kantor akuntan publik (KAP) untuk melaksanakan pekerjaan audit terhadap laporan keuangan perusahaan.

Untuk meningkatkan kredibilitas dari laporan itu, perusahaan menggunakan jasa kantor akuntan publik yang mempunyai reputasi atau nama baik. Hal ini biasanya ditunjukkan dengan kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan kantor akuntan publik besar yang berlaku universal yang dikenal dengan *Big Four Worldwide Accounting Firm (Big 4)*. Kategori KAP *the big four* di Indonesia:

1. KAP *Price Waterhouse Coopers*, yang bekerjasama dengan KAP Haryanto Sahari dan rekan.
2. KAP KPMG (*Klynveld Peat Marwick Goerdeler*), yang bekerjasama dengan KAP Siddharta-Siddharta dan Widjaja.
3. KAP *Ernst and Young*, yang bekerjasama dengan KAP Purwantono, Sarwoko dan Sandjaja.
4. KAP *Deloitte Touche Thomatsu*, yang bekerjasama dengan KAP Osman Bing Satrio dan rekan.

DeAngelo (1981) dalam Sulistyono (2010) menyimpulkan bahwa KAP yang lebih besar dapat diartikan kualitas audit yang dihasilkan pun lebih baik dibandingkan kantor akuntan kecil. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang memakai jasa kantor akuntan publik (KAP) besar cenderung tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya.

f. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka konseptual diatas maka, hipotesis dalam penelitian ini ada dua yaitu sebagai berikut:

H₁ : Komite Audit, dan Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan *multifinance* yang *listed* di BEI

H₂ : Komite Audit, dan Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan *multifinance* yang *listed* di BEI

METODOLOGI

a. Objek Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, objek penelitian adalah perusahaan *multifinance* yang tercatat di BEI periode penelitian pada tahun 2011-2013 yang memiliki data Keanggotaan Komite Audit, Independensi Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Kompetensi, dan reputasi kantor akuntan publik (KAP).

b. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Menurut Kuncoro (2003) data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data sekunder yang digunakan yaitu berupa laporan tahunan (*annual report*) perusahaan *multifinance* yang tercatat di BEI.

c. Metode Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mendownload *annual report* dari internet pada website BEI yaitu www.idx.co.id. Penelitian ini juga menggunakan metode kepustakaan, yang dilakukan untuk

mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan penelitian. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mempelajari literatur dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian.

d. Definisi Operasional Variabel Penelitian dan Pengukurannya

Untuk mengoperasionalkan variabel dalam penelitian ini akan dijelaskan definisi operasional dan pengukurannya.

1. Variabel Independen

Pengukuran variabel independen dilakukan sebagai berikut :

a. Keanggotaan Komite Audit

Keanggotaan Komite Audit dalam suatu perusahaan didefinisikan sebagai jumlah anggota komite audit di Indonesia, keanggotaan komite audit bermacam-macam, namun sebagai panduan, Bapepam (1999) dan Bursa Efek Indonesia (2000) mengatur bahwa anggota komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang. Pada Desember 1999, *New York Stock Exchange (NYSE) dan NASDAQ* memperbaharui persyaratan Komite Audit bagi perusahaan yang terdaftar di bursa saham. Dalam standar yang baru, perusahaan harus memiliki komite audit sedikitnya 3 anggota, dimana semua anggota tidak boleh memiliki hubungan dengan perusahaan karena akan mengganggu independensi mereka dari manajemen dan perusahaan. Peraturan baru ini sebagai respon atas permintaan *Stock Exchange Committee (SEC)* untuk meningkatkan efektivitas Komite Audit dalam menilai proses pelaporan keuangan. Hal tersebut sejalan dengan Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (2001) yang mensyaratkan bahwa Komite Audit beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris yang berarti mensyaratkan minimal dua anggota Komite Audit yang berfungsi sebagai ketua dan anggota Komite Audit. Keanggotaan Komite Audit diukur dari jumlah anggota Komite Audit yang dibentuk perusahaan. Jika anggota audit lebih dari 3 = 1, sedangkan kurang dari 3 = 0.

b. Independensi anggota Komite Audit

Independensi adalah suatu sikap mental yang sulit dikendalikan karena berhubungan dengan integritas seseorang. Integritas seseorang ditentukan oleh apa yang sebenarnya diyakini dan dilaksanakan dalam kenyataan (*in fact*) bukan hanya apa yang terlihat (*in appearance*) (FGCI, 2000). Independensi anggota Komite Audit sejalan dengan Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (2001) yang mensyaratkan minimal dua anggota Komite Audit yang berfungsi sebagai ketua dan anggota Komite Audit. *New York Stock Exchange (NYSE) dan NASDAQ* mensyaratkan bahwa perusahaan harus memiliki Komite Audit sedikitnya 3 (tiga) anggota, dimana semua anggota tidak boleh memiliki hubungan dengan perusahaan karena akan mengganggu independensi mereka dari manajemen dan perusahaan. Variabel ini diukur dari proporsi jumlah anggota yang berasal dari luar Emiten dengan jumlah anggota Komite Audit. Data untuk variabel ini diperoleh dari laporan tahunan serta surat pengangkatan komisaris independen dan Komite Audit serta Direktori Pasar Modal Indonesia.

c. Proporsi Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota komisaris yang:

- 1) berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik

- 2) tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik
- 3) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik
- 4) tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan BEI tanggal 1 Juli 2000 menyatakan bahwa perusahaan yang mencatatkan diri di bursa saham harus mempunyai Komisaris Independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham minoritas (bukan *controlling shareholders*). Dalam peraturan ini, jumlah persyaratan minimal adalah 30% dari seluruh Dewan Komisaris. Proporsi Komisaris Independen diukur dari anggota Komisaris Independen dengan jumlah total Komisaris Independen

d. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan harus yang dimiliki mengenai pemahaman yang memadai tentang akuntansi, audit dan sistem yang berlaku dalam perusahaan. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkatan pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota Komite Audit untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. *The Indonesian Institute For Corporate Governance* (2000) memuat ketentuan bahwa anggota Komite Audit harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai akuntansi, audit dan sistem yang berlaku dalam perusahaan. Disamping itu, anggota Komite Audit juga harus memiliki atribut-atribut untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, yaitu sifat tidak mudah percaya (*suspicious mind*), dan memiliki rasa ingin tahu (*inquisitive mind*), dapat berpikir logis (*logical mind*) dan memiliki kemampuan untuk menganalisa masalah (*analytical ability*). Peraturan Bepepam mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit mensyaratkan bahwa salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan. Variabel ini diukur dari proporsi anggota Komite Audit yang kompeten dengan jumlah anggota Komite Audit.

e. Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Untuk meningkatkan kredibilitas dari laporan keuangannya, perusahaan menggunakan jasa kantor akuntan publik (KAP) yang mempunyai reputasi atau nama baik. Hal ini biasanya ditunjukkan dengan kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan kantor akuntan publik besar yang berlaku universal yang dikenal dengan *Big Four Worldwide Accounting Firm* (*Big 4*). Variabel ini diukur dengan kategori perusahaan yang menggunakan jasa KAP yang berafiliasi dengan KAP *Big 4*. Variabel ini dinilai 1 (satu) jika perusahaan menggunakan jasa KAP yang berafiliasi dengan KAP *Big 4* dan 0 (nol) jika sebaliknya.

2. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan *Multifinance* yang tercatat di BEI periode

2011-2013. Menurut Allintina (2010) Tepat waktu diartikan bahwa informasi harus disampaikan sedini mungkin agar dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan. Variabel dependen ini adalah variabel *dummy*, untuk mengukur ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan yang diukur berdasarkan keterlambatan pelaporan keuangan perusahaan, yang didasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM berdasarkan UU No.8 tahun 1995 dan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-36/PM/2003 yang diperbaharui dengan Keputusan Ketua BAPEPAM - LK No: KEP-40/BL/2007 yang menyatakan bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di BAPEPAM - LK selambat-lambatnya 90 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya tahun buku. Untuk melihat ketepatan waktu, biasanya suatu penelitian melihat keterlambatan pelaporan (*lag*). Dyer dan McHugh (1975) dalam Purwati (2013) menggunakan tiga kriteria keterlambatan:

- a. *Preliminary lag*, yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan akhir *preliminary* oleh bursa
- b. *Auditor's report lag*, yaitu jumlah hari antara laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani
- c. *Total lag*, adalah interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerimaan laporan dipublikasikan oleh bursa

Perusahaan dikategorikan terlambat jika laporan keuangan dilaporkan setelah tanggal 31 Maret, sedangkan perusahaan yang tepat waktu adalah perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan sebelum tanggal 31 Maret. Ketepatan diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, dimana kategori 1 (satu) untuk perusahaan yang tepat waktu dan kategori 0 (nol) untuk perusahaan yang tidak tepat waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehadiran industri pembiayaan (*multifinance*) di Indonesia sesungguhnya belumlah terlalu lama, terutama bila dibandingkan dengan di negara-negara maju. Dari beberapa sumber, diketahui industri ini mulai tumbuh di Indonesia pada 1974. Kelahirannya didasarkan pada surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan.

Setahun setelah dikeluarkannya SKB tersebut, berdirilah PT Pembangunan Armada Niaga Nasional pada 1975. Kelak, perusahaan tersebut mengganti namanya menjadi PT (Persero) PANN *Multi Finance*.

Tepatnya tanggal 2 Juli 1982 dibentuk Asosiasi *Leasing* Indonesia (ALI) yang berkedudukan di Jakarta sebagai satu-satunya wadah komunikasi bagi perusahaan-perusahaan *leasing* di Indonesia. Kehadiran ALI telah dirasakan manfaatnya oleh seluruh pelaku usaha *leasing* di Indonesia dan ALI telah berhasil melakukan berbagai aktivitas guna kepentingan para anggotanya, termasuk membantu pengembangan industri usaha *leasing* di Indonesia bersama pemerintah.

Kemudian, melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.61/1988, yang ditindaklanjuti dengan SK Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988, pemerintah membuka lebih luas lagi bagi bisnis pembiayaan, dengan cakupan kegiatan meliputi *leasing*, *factoring*, *consumer finance*, modal *ventura* dan kartu kredit.

Pada tahun berikutnya (1990), industri *leasing* mulai kembali pada prinsip dasar ekonomi. mereka lebih mengutamakan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Pada tahun 1991, kembali terjadi perubahan besar-besaran pada perusahaan pembiayaan. Seiring dengan kebijakan uang ketat (TMP = *tight money policy*) - yang lebih dikenal dengan Gebrakan Sumarlin I dan II - suku bunga pun ikut meroket naik. Akibatnya, banyak kredit yang sudah disetujui terpaksa ditunda pencairannya. Dari sisi permodalan, TMP membuat perusahaan multi finance seperti kehabisan darah. Aliran dana menjadi seret. walaupun ada, harganya tinggi sekali. Itulah sebabnya banyak di antara mereka yang menggabungkan usahanya. Dengan bergabung, mereka lebih mudah dalam memperoleh kredit, termasuk dari luar negeri.

Seiring dengan pertumbuhan sektor usaha jasa pembiayaan dan guna menampung aspirasi seluruh anggota maka pada tanggal 20 Juli 2000 telah diambil keputusan untuk mengubah ALI menjadi Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). Keputusan diatas sejalan dengan keberadaan usaha para anggota sebagai perusahaan pembiayaan yang dapat melakukan aktivitas usaha: sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), pembiayaan konsumen (*consumer finance*), dan kartu kredit (*credit card*).

Dalam perkembangannya pada tanggal 21 Desember 2000 Asosiasi *Factoring* Indonesia (AFI) juga telah bergabung ke dalam APPI. Sesuai dengan tujuan didirikannya, APPI bersama pemerintah terus berupaya memberikan andil dan peran lebih berarti dalam peningkatan perekonomian nasional khususnya pada sektor usaha jasa pembiayaan.

a. Pengujian Data

1. Uji Multikolonieritas

**Hasil Uji Multikolonieritas
Correlation Matrix**

		Constant	X1	X2	X3	X4	X5
Step 1	Constant	1.000	-.565	-.344	-.908	.338	-.312
	X1	-.565	1.000	.130	.375	-.493	-.003
	X2	-.344	.130	1.000	.113	-.028	-.492
	X3	-.908	.375	.113	1.000	-.355	.359
	X4	.338	-.493	-.028	-.355	1.000	-.247
	X5	-.312	-.003	-.492	.359	-.247	1.000

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 17.0

Dari tabel diatas menunjukkan korelasi antar variabel independent di dalam penelitian ini. Matrik korelasi dibawah menunjukkan tidak adanya gejala multikolinearitas yang serius antar variabel bebas, sebagaimana terlihat dari nilai korelasi antar variabel bebas masih jauh di bawah 0,9. Korelasi antar variable bebas menunjukkan angka negatif (-) yang berarti antar variabel bebas terdapat korelasi tak langsung atau korelasi negatif.

b. Pengujian Hipotesis

1. Uji G

**Hasil Pengujian Uji G
Model Summary**

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	14.759 ^a	.396	.639

a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than .001.

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 17.0

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai rasio kemungkinan sebesar 14,759. Sedangkan nilai *Chi-square* tabel = 48,290 dengan $\alpha = 0,05$ dan $df = 26$ ($n-k-1 = 32-5-1$). Dengan demikian dapat dilihat bahwa $G \leq \chi^2_{\alpha,p}$, yaitu $14,759 \leq 48,290$ sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Ini berarti bahwa tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel bebas secara simultan terhadap variabel tak bebas terhadap $\alpha = 0,05$.

2. Uji Wald

Hasil Pengujian Uji Wald

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
							Lower	Upper
Step 1 ^a								
X1	-.984	2.121	.215	1	.643	.374	.006	23.890
X2	-.366	2.713	.018	1	.893	.693	.003	141.464
X3	.734	9.081	.007	1	.936	2.084	.000	1.119E8
X4	4.397	1.696	6.720	1	.010	81.179	2.922	2255.004
X5	-1.488	2.052	.526	1	.468	.226	.004	12.607
Constant	.671	5.097	.017	1	.895	1.955		

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dengan $\alpha = 0,05$ dan $df = 1$ pada tabel *Chi-square* diperoleh nilai *Chi-square* tabel = 3,84. Nilai uji statistik *Wald* pada variabel Keanggotaan Komite Audit, Independensi anggota Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Reputasi Kantor Akuntan Publik lebih kecil dari nilai *Chi-square* tabel berarti H_0 di terima yang artinya parameter tersebut tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi α . sedangkan untuk variabel kompetensi lebih besar dari nilai *Chi-square* berarti H_0 di tolak yang artinya parameter tersebut signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi α . Untuk nilai statistik *Wald* variabel Kompetensi lebih besar dari nilai *Chi-square* tabel.

3. Menguji Model *Fit* (*Overall Model Fit*)

Hasil Pengujian Model Fit Model Fit

-2 LL awal (Block Number = 0)	30.885
-2 LL akhir (Block Number = 1)	14.759

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 17.0

Dari tabel diatas menunjukkan perbandingan antara nilai -2LL awal dengan nilai -2LL akhir. Perhatikan angka -2LL awal (*Block Number* = 0) angka -2LL adalah 30, 885. Sedangkan pada -2LL akhir (*Block Number* = 1) angka -2LL mengalami penurunan menjadi 14,759. Penurunan *likelihood* ini menunjukkan model regresi yang baik atau fit.

4. Menguji kelayakan model regresi (Uji *Hosmer and Lomeshow*)

Hasil Pengujian Kelayakan Model Regresi Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	4.261	6	.641

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 17.0

Dari tabel diatas menunjukkan hasil pengujian *Hosmer and Lomeshow*. Dengan probabilitas signifikasi menunjukkan angka 0,641, nilai signifikasi yang diperoleh ini jauh lebih besar dari pada 0,05 (α) 5%, maka H_0 tidak dapat ditolak (diterima). Hal ini berarti model regresi layak untuk digunakan dalam analisis selanjutnya, karena tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati. Atau dapat dikatakan bahwa model mampu memprediksi nilai observasinya.

5. Koefisien Determinasi

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	14.759 ^a	.396	.639

a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than .001.

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 17.0

Tabel diatas menunjukkan nilai *Nagelkerke R Square*. Dilihat dari hasil output pengolahan data nilai *Nagelkerke R Square* adalah sebesar 0,639 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 63%, sisanya sebesar 37% dijelaskan oleh variabilitas variabel-variabel lain diluar model penelitian. Atau secara bersama-sama variasi variabel keanggotaan komite audit, independensi anggota komite audit, proporsi komisaris independen, kompetensi dan reputasi Kantor Akuntan Publik dapat menjelaskan variasi variabel ketepatan waktu pelaporan keuangan sebesar 63%.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menguji pengaruh karakteristik Komite Audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan publik yang tercatat di BEI. Karakteristik Komite Audit yang digunakan sebagai variabel independen dalam pengujian ini meliputi Keanggotaan Komite Audit, Independensi anggota Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Kompetensi, dan Reputasi Kantor Akuntan Publik. Penelitian ini menggunakan sampel 13 perusahaan *multifinanceterdaftar* di Bursa Efek Indonesiaperiode 2011 - 2013. Hasil pengujian dengan menggunakan regresi *logistic* dengan menggunakan Uji *Wald* dan Uji *G* memberikan bukti empiris bahwa :

1. Komite Audit, dan Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) secara bersama sama tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
2. Variabel Keanggotaan Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
3. Variabel Independensi anggota Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
4. Variabel Proporsi Komisaris berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
5. Variabel Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
6. Variabel Reputasi Kantor Akuntan Publik tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Dengan berbagai analisa yang telah penulis lakukan berdasarkan kesimpulan, pada peneliti dapat diberikan saran Bagi peneliti yang akan datang, dapat menambahkan variabel independen yang lain antara lain frekuensi pertemuan yang dilakukan oleh komite audit, proses kerja komite audit dan komisaris independen, serta opini audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, Tutut Dwi. 2010. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba. *Tesis*. Universitas Diponegoro. Semarang
- Blue Ribbon Committee (BRC). 1999. *Report and Recommendations of the Blue Ribbon Committee on Improving the Effectiveness of Corporate Audit committee*. New York, N.Y: New York stock Exchange and National Association of Securities Dealers
- Catrinasari, Renny. 2006. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Perbankan Go Publik di Bursa Efek Jakarta (BEJ). *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta
- Chrisanty, Yuanita Dhiora. 2010. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. *Tesis*. Universitas Diponegoro. Semarang
- FCGI. 2000. *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance Tata kelola Perusahaan*. *Booklet* Jilid II Edisi ke-2
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Edisi 3*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Dioneoro
- Humairoh, Reka Maiyarni & Yuliana. 2010. Pengaruh Rasio Gearing (Gear), Profitabilitas (Profit), Ukuran Perusahaan (Size), Umur Perusahaan (Age) dan Penggunaan Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap Ketepatan Waktu

- Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Listed di BEI. *Jurnal Cakrawala Akuntansi Volume 2, Nomor 1*. Universitas Jambi. Jambi
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- Indonesia Stock Exchange. 2011. (<http://www.idx.co.id>, diakses 15 September 2011)
- Kliembaum G. David. 1994. *Logistic Regression A self Learning Text*. USA: Springer
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Nugraha, Yuniyanto. 2009. Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan. *Skripsi*. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran". Jakarta
- Peraturan Bank Indonesia. Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. No: 8/14/PBI/2006
- Peraturan Menteri Keuangan. Perusahaan Pembiayaan. No: 84/PMK.012/2006
- Peraturan Menteri Negara BUMN. Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara. No: PER-05/MBU/2006
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Penyelenggaraan Kegiatan dibidang Pasar Modal. No. 45 Tahun 1995
- Purwati, Atiek Sri. 2006. Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Publik yang Tercatat di BEJ. *Tesis*. Universitas Diponegoro. Semarang
- Rama, Dasaratha V. 2003. Komposisi komite audit dan tindakan pemegang saham: bukti dari suara pada ratifikasi auditor. *A Journal of Practice & Theory*
- Saleh, Rachmad. 2004. Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta. *Simposium Nasional Akuntansi VII*. Denpasar
- Schmidt, Jaime dan Mike Wilkins. 2011. *Bringing Darkness to Light : The Influence of Auditor Quality and Audit Committee Expertise on The Timeliness of Financial Statement Restatement Disclosure*.
- Sugiyono. 2010. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta
- Sulistyo, Wahyu Adhi Noor. 2010. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan pada Perusahaan yang *Listing* di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2008. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang
- Surat Edaran BAPEPAM. Pembentukan Komite Audit. No. SE.03/PM/2000
- Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta. Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. No: KEP-305/BEJ/07-2004
- Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan Laporan Keuangan. Jangka Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya Tercatat Di Bursa Efek Di Indonesia dan di Bursa Efek di Negara Lain. No: Kep-40/BL/2007
- Surat Keputusan Ketua BAPEPAM. Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. No: Kep-36/PM/2003

- Surat Keputusan Ketua BAPEPAM. Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. No: Kep-29/PM/2004
- Surat Keputusan Ketua BAPEPAM. Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. No: Kep-41/PM/2003
- Surat Keputusan Menteri BUMN. Pembentukan Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara. No: KEP-103/MBU/2002
- Surat Keputusan Menteri BUMN. Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). No: KEP-117/M-MBU/2002
- Thoopsamut, Wiwanya. 2008. Hubungan antara karakteristik Komite Audit, ukuran perusahaan Audit dan manajemen Laba dalam laporan keuangan triwulanan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Thailand. *Jurnal*. Universitas Chulalongkorn. Thailand
- Veronica, Sylvia dan Siddharta Utama. 2005. Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan praktek *Corporate Governance* terhadap Pengelolaan Laba (*Earnings Management*). *Simposium Nasional Akuntansi VIII*. Solo
- Zaitul. 2010. *Board of Directors, Audit Committee, Auditor Characteristics and Timeliness of Financial Reporting in Listed Company in Indonesia*. Tesis. Universiti Utara Malaysia. Malaysia
- <http://chollishst05.blogspot.com/2008/03/metode-statistik.html>, (diakses 18 Agustus 2011)
- <http://ilmumanajemen.wordpress.com/2008/12/11/arti-penting-laporan-keuangan>, (diakses 26 Februari 2011)
- Bapepam, 2000. Pembentukan Komite Audit, Surat Edaran Bapepam No. SE.03/PM/2000
- Bapepam, 1996. Himpunan Peraturan Pasar Modal.